

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 21 April 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Halaman 6	Selasa, 21 April 2020	BKPM: Proyek Infrastruktur Mulai Berdampak Positif	Badan Koordinasi Penanaman Modal meyakini pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir mulai memberi dampak pada realisasi investasi di Indonesia.
2	Media Indonesia, Halaman 13	Selasa, 21 April 2020	Pemerintah Jajaki Swasta Garap SPAM Karian-Serpong	Kementerian PUPR menjajaki minat pasar dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Karian-Serpong berkapasitas 4.600 liter/detik.
3	Media Indonesia, Halaman 13	Selasa, 21 April 2020	Rusunawa MBR untuk Isolasi Pasien Korona	Rusunawa untuk masyarakat MBR yang dibangun Kementerian PUPR di Lampung difungsikan untuk penanganan virus korona (covid-19).
4	Koran Tempo, Halaman Ekonomi dan Bisnis 2	Selasa, 21 April 2020	Penyusunan Rencana Induk Pertajam Potensi Ibu Kota Negara	Kementerian Bappenas akan mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintah baru.

Judul	BKPM: Proyek Infrastruktur Mulai Berdampak Positif	Tanggal	Selasa, 21 April 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 6		
Resume	Badan Koordinasi Penanaman Modal meyakini pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir mulai memberi dampak pada realisasi investasi di Indonesia.		

■ INFRASTRUKTUR DAN REALISASI INVESTASI



Bisnis/Dedi Gunawan

Kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan Lintas Rel Terpadu di Kawasan Kelapa gading, Jakarta, Senin (20/4). Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir mulai memberi

dampak pada realisasi investasi. BKPM menyebutkan bahwa realisasi investasi pada triwulan I/2020 tercatat sebesar Rp210,07 triliun dari 25.192 proyek investasi. Untuk PMA 46,5% dan PMDN yaitu 53,5%.

| INVESTASI LUAR JAWA |

BKPM: Proyek Infrastruktur Mulai Berdampak Positif

Bisnis, JAKARTA — Badan Koordinasi Penanaman Modal meyakini pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir mulai memberi dampak pada realisasi investasi di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan keyakinan itu merujuk data realisasi investasi pada triwulan I/2020 tercatat sebesar Rp210,07 triliun dari 25.192 proyek investasi. Perinciannya, penanaman modal asing (PMA) 46,5% dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yaitu 53,5%.

Realisasi investasi itu membaik jika mengacu akumulasi dari sebaran investasinya, dengan perbandingan Pulau Jawa sekitar 51,4% dan luar Jawa 48,65%. Pada triwulan I/2019, realisasi investasi di

luar Pulau Jawa yaitu 46% dan di Jawa sekitar 54%.

"Data ini menggambarkan dan membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur pada 5 tahun kemarin yang dilakukan oleh Pak Jokowi-JK [Jusuf Kalla], itu sekarang sudah mulai ada dampak," ujarnya dalam konferensi pers BKPM secara daring, Senin (20/4).

Bahlil menyatakan persyaratan utama investor akan melakukan investasi di wilayah luar Pulau Jawa apabila memenuhi tiga syarat minimal. Syarat itu adalah infrastrukturnya harus bagus, bagaimana tenaga kerja tersedia dan murah, serta bagaimana pendekatan bahan baku.

Sementara itu, pemerhati tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan selama 5 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-

Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur memang masif dilakukan untuk konektivitas.

"Jaringan jalan sudah mulai banyak dibangun, bandara banyak dibangun, bagi investor kelengkapan infrastruktur menjadi nilai tambah dalam konteks efisiensi, efektivitas dalam pengembangan investasi," jelasnya.

Yayat juga menilai perlu dipetakan jenis investasi seperti apa yang masih menarik bagi investor di tengah pandemi virus corona. Selain itu, imbuhnya, kelengkapan infrastruktur diperlukan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan dalam investasi ke depan.

Menurutnya, perlu dipelajari, dampak kebijakan relaksasi yang diberikan terhadap minat investor. (Agne Yasa)

Judul	Pemerintah Jajaki Swasta Garap SPAM Karian-Serpong	Tanggal	Selasa, 21 April 2020
Media	Media Indonesia, Halaman 13		
Resume	Kementerian PUPR menjajaki minat pasar dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Karian-Serpong berkapasitas 4.600 liter/detik.		

Pemerintah Jajaki Swasta Garap SPAM Karian-Serpong

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menjajaki minat pasar dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Karian-Serpong berkapasitas 4.600 liter/detik. Skema ini dipilih karena keterbatasan APBN dan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Prasarana dan sarana air minum ini ialah salah satu infrastruktur dasar yang berpengaruh pada kesehatan dan lingkungan," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono melalui *video conference*, akhir pekan lalu.

Ia berharap melalui proyek senilai Rp2,21 triliun yang ditawarkan kepada investor swasta itu, bisa mencegah turunnya muka air tanah akibat penggunaan air tanah berlebihan oleh perumahan atau perkantoran di Jakarta.

"Kalau proyek SPAM Karian-Serpong ini selesai, kita baru bisa mengeluarkan kebijakan melarang orang-orang memakai air tanah. Selama ini belum selesai, tidak akan bisa melarang orang memakai air tanah, mengingat selama ini kebutuhan air dipasok hanya dari Jatiluhur, Jabar, sehingga tidak mencukupi," ujar Basuki. (Dro/S-3)

Judul	Rusunawa MBR untuk Isolasi Pasien Korona	Tanggal	Selasa, 21 April 2020
Media	Media Indonesia, Halaman 13		
Resume	Rusunawa untuk masyarakat MBR yang dibangun Kementerian PUPR di Lampung difungsikan untuk penanganan virus korona (covid-19).		

INFO

Rusunawa MBR untuk Isolasi Pasien Korona

RUSUNAWA untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) di Lampung difungsikan untuk penanganan virus korona (covid-19).

Fasilitas tersebut diadakan sebagai tempat isolasi untuk mengantisipasi lonjakan pemudik karena semakin banyaknya perantau yang akan pulang kampung pada Ramadan hingga menjelang Lebaran tahun ini.

"Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Lampung dan pemda terus bekerja keras untuk penanganan covid-19. Semua properti yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan penanganan virus ini akan terus didorong seperti pemanfaatan rusunawa ini," ujar Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Lampung, Zubaidi, belum lama ini.

Rusunawa MBR ini berlokasi di Jalan Lintas Sumatra, Agom, Kedaton, Lampung Selatan. Rusunawa setinggi tiga lantai itu dibangun dengan biaya Rp14,58 miliar, dengan 42 unit kamar yang bisa menampung 168 orang. Kementerian PU-Pera juga melengkapi rusunawa ini dengan perabotan dan perangkat lainnya sehingga siap huni. (Gan/S-3)

Judul	Penyusunan Rencana Induk Pertajam Potensi Ibu Kota Negara	Tanggal	Selasa, 21 April 2020
Media	Koran Tempo, Halaman Ekonomi dan Bisnis 2		
Resume	Kementerian Bappenas akan mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintah baru.		

EKONOMI DAN BISNIS

Penyusunan Rencana Induk Pertajam Potensi Ibu Kota Negara

Bappenas mempertajam kajian sektor jasa akan menjadi prioritas.
1000, 21 APRIL 2020



Membangun Perekonomian Baru

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkeinginan menyelesaikan rencana induk proyek ibu kota negara (IKN). Salah satu tujuan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu adalah pemerataan perekonomian ke luar wilayah Pulau Jawa.

Sumber daya manusia di IKN

Jumlah penduduk IKN:

- 2025: 0,3 juta orang
 - 2045: 1,2-1,5 juta orang
- Jumlah aparat sipil negara: 182.462

Proyeksi pengembangan perekonomian jangka pendek

Di kawasan IKN 56 ribu hektare

Sektor eksisting:

- Pariwisata
- Pendidikan

Sektor masa depan jangka pendek:

- Teknologi informasi

Provinsi Kalimantan Timur dan daerah khusus IKN

Sektor eksisting

- Pertanian
- Energi terbarukan
- Pertambangan berkelanjutan
- Pariwisata

Sektor masa depan jangka pendek:

- Farmasi
- Oleokimia
- Logistik kemaritiman

Perkiraan dampak pertumbuhan ekonomi

- Jangka pendek terhadap Pulau Kalimantan: meningkat 3,6%
- Jangka panjang terhadap Pulau Kalimantan: meningkat 3,7%
- Jangka pendek terhadap nasional: meningkat 0,5%
- Jangka panjang terhadap nasional: meningkat 0,1%

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintahan baru.

Bergesernya target penyelesaian rencana induk ibu kota negara hingga akhir tahun dimanfaatkan untuk mempertajam kajian tersebut. "Master plan harus semakin bagus agar semakin menarik dikerjasamakan dengan swasta," ucap Deputy Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soepriyadi Prawiradinata, kepada Tempo, kemarin.

Penelitian mengenai sektor potensial di ibu kota baru menjadi salah satu item utama yang dikaji sejak penyusunan pra-master plan. Setelah menysir berbagai variabel pembentuk produk domestik regional bruto, Bappenas memperkirakan proyek ibu kota yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu akan membangkitkan sektor jasa, dari pendidikan, kesehatan, hingga jasa umum.

"Tapi kami harus memastikan daya dukungnya dulu karena akan menarik urbanisasi," ucap Rudy. Ia menambahkan, untuk tiga tahun pertama, proyek ibu kota negara itu masih berfokus pada sektor infrastruktur.

Dengan begitu, menurut Rudy, kajian pra-master plan ibu kota baru yang disusun bersama McKinsey Indonesia sejak akhir 2019 bisa dilengkapi. Meski tak merinci, Rudy menyebutkan, penelitian itu sudah mencakup proyeksi kependudukan serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang akan turut dijadikan metropolitan baru.

Pembahasan rencana induk ibu kota ini melibatkan sembilan kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga. "Selain pokja infrastruktur, ada pokja peneliti pembiayaan, dampak ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan," ujar Rudy.

Bappenas tetap melanjutkan penawaran paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara senilai Rp 85 miliar, yang dibiayai APBN 2020. "Penawaran itu sudah terencana sejak akhir 2019 dan sudah bidding internasional," ucap Rudy.

Melalui situs layanan pengadaan elektronik (LPSE), Bappenas menawarkan paket pekerjaan konsultasi pembuatan rencana induk dengan metode penunjukan langsung. Semua calon peserta akan dievaluasi pada 27-29 April mendatang. Adapun penandatanganan kontrak dijadwalkan pada awal bulan depan.

Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan desain basis kawasan inti ibu kota yang disusun lembaganya akan diselaraskan dengan rencana induk Bappenas.

"Begitu master plan untuk desain makro sudah ada, pasti lokasi titik inti ibu kotanya sudah jelas, sehingga PUPR akan memfokuskan pembangunan pertama di sana," katanya. Meski begitu, Endra memastikan Kementerian PUPR belum mengalokasikan anggaran tahun ini untuk pembangunan fisik proyek ibu kota negara.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Rizal Taufikurrahman, memperkirakan tahap pertama megaprojek itu mendongkrak sektor jasa konstruksi dan industri bahan baku material di Kalimantan dan sekitarnya. Para pelaku industri olahan, seperti semen, mineral, dan baja, diprediksi menaikkan volume distribusi ke Kalimantan. **YOHANES PASKALIS**